



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)  
PANSUS RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DENGAN  
YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN (YKPP) DAN  
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(BAPETARUM PNS)**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat)
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 26 Oktober 2015
P u k u l	: 13.00 s.d 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara
Acara Rapat	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Tapera dari YKPP dan Bapertarum PNS
Ketua Rapat	: Bertu Merlas, ST.
Sekretaris	: Dra. Nurani Bodroini
H a d i r	: 11 dari 30 Anggota

## I. PENDAHULUAN

Setelah beberapa Anggota menandatangani daftar hadir Pansus, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan menyampaikan pengantar rapat serta menjelaskan agenda RDPU pada hari/tanggal tersebut dan menyatakan rapat terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada pihak Bapertarum PNS dan YKPP untuk memberikan masukan terkait dengan Draft RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Setelah pihak yang diundang menyampaikan masukan-masukan terkait dengan RUU Tapera, maka Ketua Rapat merangkum hasil masukan dari Bapertarum PNS dan YKPP.

**Adapun paparan dari YKPP dan BAPERTARUM PNS adalah sebagai berikut:**

**A. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM PNS) disampaikan oleh Heroe Soelistiwan (Dirut Bapertarum PNS)**

1. Filosofi Pelayanan BAPERTARUM-PNS adalah berdasarkan asas Gotong Royong antar peserta dan seperti bentuk Arisan, Tabungan diambil dimuka
2. Dimungkinkan karena : Kontrol anggota yg kuat, rendahnya tingkat *turn over* PNS, serta jaminan kenaikan Gaji PNS setiap tahunnya.
3. Kelembagaan Organisasi BAPERTARUM-PNS diketuai oleh Presiden RI dengan Ketua Harian Menteri PU-PR.

4. BAPERTARUM-PNS merupakan Lembaga Non Struktural dan tidak berbadan Hukum.
5. Proses Bisnis BAPERTARUM-PNS dimulai dari iuran yang diterima dari PNS dan CPNS, kemudian dibagi-bagi menjadi 3 menjadi dana cadangan, dana pemanfaatan dan dana pemupukan.
6. Dana pemanfaatan disalurkan menjadi 3 yaitu dana pengembalian tabungan, dana bantuan, dan terakhir pembiayaan.
7. Iuran Peserta Taperum-PNS (Keppres 14/1993)
  - Gol I : Rp3.000
  - Gol II : Rp5.000
  - Gol III : Rp7.000
  - Gol IV : Rp10.000
8. Bantuan Uang Muka (BUM)/Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) (Kepmenpera 1/1995) berkisar antara 1,2 jt - 1,8 jt.
9. Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM)/Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM) (Permenpera 11/2014) berkisar 20 jt – 30jt.
10. Sistem Pengelolaan Keuangan untuk PNS masing-masing dibuatkan *individual account*.
11. Sisa dana iuran diinvestasikan ke deposito pada bank pemerintah (4 bank pemerintah) dilakukan dengan cara lelang terbuka (Open Bidding).
12. Posisi Dana TAPERUM-PNS (per September 2015) yaitu sebesar Rp10,09T, terdiri dari portofolio di Kementerian PU-PR Rp.3,38 T dan portofolio di Kementerian Keuangan Rp.6,71 T.
13. Penempatan dilakukan pada produk deposito, giro dan surat berharga.
14. Saran dan Keluhan terhadap BAPERTARUM-PNS saat ini adalah (1) Nilai bantuan sudah tidak memadai lagi dgn kondisi saat ini (2) Masa kerja 5 tahun terlalu lama minta ditinjau menjadi 1–3 tahun (3) Gol IV tidak dapat memanfaatkan layanan Bantuan BAPERTARUM-PNS (4) Besaran Taperum-PNS yg dipotong tiap bulannya diusulkan untuk naik (5) Bila bantuan tidak dimanfaatkan maka Taperum-PNS dikembalikan tanpa bunga (6) Perluasan pemanfaatan layanan TAPERUM-PNS.
15. Transformasi Menuju TAPERA perlu (1) Menyiapkan Organisasi dan tata kelola yg baik (2) Menyiapkan System dan Technology yg memadai (3) Menyiapkan business Proses Pelayanan yg pro aktif.
16. Masa Transisi diperlukan (1) Menyiapkan proses penutupan Bapertarum (2) Menyiapkan sarana dan prasarana transisi menuju TAPERA (3) Menyiapkan Organisasi dan Personalia sesuai dengan kebutuhan BP TAPERA (4) Menyiapkan System dan Technology.
17. Usulan Pemanfaatan Dana TAPERA bahwa PNS akan memperoleh Manfaat TAPERA + Hasil Pemupukan BAPERTARUM-PNS.
18. Besar potongan Peserta sebesar 3%-6% seperti yang sudah dilakukan Bapertarum selama ini terhadap PNS golongan I-IV, telah merumahkan PNS sebanyak kurang lebih 400 ribu orang atau sekitar  $\frac{1}{4}$  dari seluruh PNS pada tahun 1993-1998.
19. Berdasarkan pengalaman Bapertarum-PNS angka 3%-5% masih rasional, sebaiknya dikomunikasikan dengan para penabung bahwa ini ini tidak hanya sebagai *saving account* tetapi juga bersifat investasi.
20. Untuk besaran simpanan Taperum bisa menggunakan persentase seperti Bapertarum atau menggunakan nominal.

21. Selama ini Bapertarum-PNS dalam hal iuran, pemanfaatan, dan akses bank dibatasi dengan Kepres, usulannya untuk Tapera jangan dibatasi sehingga untuk kedepannya Tapera lebih baik agar bisa lebih berkembang.
22. Sebaiknya dipertimbangkan untuk investasi dalam bentuk tanah (*land banking*).
23. Untuk waktu peralihan yang dibutuhkan yaitu 2 tahun, 1 tahun pertama untuk mengurus administrasi dan keuangan, kemudian tahun berikutnya untuk *exercise* di sistem dan teknologi.
24. Supaya UU Tapera ini kedepannya bisa berlaku disetiap jaman, sebaiknya memberikan pengaturan instrumen-instrumen kepada peraturan di bawahnya.

**B. Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) disampaikan oleh Hary Juwono (Ketua YKPP)**

1. YKPP sangat berbeda dengan Bapertarum-PNS.
2. Berdiri sejak tahun 2007, untuk para anggota TNI Polri.
3. Bertugas membantu Kemhan khususnya di bidang pendidikan dan perumahan.
4. Dana yang dipisahkan secara mandiri dan dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada Purnawirawan dan yang masih aktif.
5. Untuk purnawirawan diberikan dan bantuan sebesar 20jt, sedangkan bagi yang masih aktif diberikan dana pinjaman uang muka tanpa bunga.
6. Segala pemanfaatan diperhitungkan dengan ASABRI.

**II. Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.**

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris,

  
**Dra. Nurani Bodroini**  
NIP. 196007031988032001



## DAFTAR HADIR

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)  
PANSUS RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DENGAN  
YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN (YKPP) DAN  
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(BAPETARUM PNS)  
HARI/TANGGAL : SENIN, 26 OKTOBER 2015**

<b>NO URUT</b>	<b>N A M A</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Drs. Yoseph Umarhadi. M.Si.,MA.	162	F-PDIP	Ketua	Hadir
2.	H. Mukhamad Misbakhun, SE.	283	F-PG	Wakil Ketua	Ijin
3.	Drs. H. Saiful Rasyid, MM.	384	F-P. Gerindra	Wakil Ketua	Hadir
4.	Bertu Merlas, ST.	41	F-PKB	Wakil Ketua	Hadir
5.	Sadarestuwati	201	F-PDIP	Anggota	Hadir
6.	Arteria Dahlan, ST., SH.	197	F-PDIP	Anggota	
7.	Agustina Wilujeng Pramestutui, SS.	174	F-PDIP	Anggota	
8.	H. Indra P. Simatupang, SE., MBA.	157	F-PDIP	Anggota	
9.	Ir. Ketut Sustiawan	150	F-PDIP	Anggota	Hadir
10.	H. Budi Supriyanto, SH., MH.	280	F-PG	Anggota	Ijin
11.	H. Andika Hazrumy, S.Sos.	293	F-PG	Anggota	
12.	dr. Charles Jones Mesang	301	F-PG	Anggota	Hadir
13.	H. Hasnuryadi Sulaiman	306	F-PG	Anggota	
14.	H. Willgo Zainar, SE., MBA.	379	F-P. Gerindra	Anggota	Hadir
15.	Tgk. Khaidir	325	F-P. Gerindra	Anggota	Hadir
16.	H. Subarna, SE., M.Si.	352	F-P. Gerindra	Anggota	
17.	Michael Wattimena, SE., MM.	457	F-PD	Anggota	
18.	Anton Sukartono Suratno	417	F-PD	Anggota	Ijin
19.	Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si.	452	F-PD	Anggota	Ijin

NO URUT	N A M A	NO. ANGGOTA	FRAKSI	JABATAN	KET.
20.	H. Yandri Susanto, S.Pt.	494	F-PAN	Anggota	
21.	H.A. Bakri HM, SE.	464	F-PAN	Anggota	
22.	H. Nasril Bahar, SE.	461	F-PAN	Anggota	Hadir
23.	Drs. H. Musa Zainuddin	42	F-PKB	Anggota	
24.	Ir. H. Sigit Sosiantomo	114	F-PKS	Anggota	Ijin
25.	Dr. Hermanto, SE., MM.	88	F-PKS	Anggota	Ijin
26.	Drs. H. Hasrul Azwar, MM.	507	F-PPP	Anggota	Hadir
27.	H. Epyardi Asda, M.Mar.	509	F-PPP	Anggota	
28.	H. Syarif Abdullah Alkadrie	13	F-P. Nasdem	Anggota	Ijin
29.	Ahmad H.M. Ali, SE.	32	F-P. Nasdem	Anggota	
30.	Fauzih H. Amro, M.Si.	548	F-P.Hanura	Anggota	Hadir

No.	NAMA	JABATAN
<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI</b>		
1.	Maurin Sitorus	Dirjen Pembiayaan
2.	Baby S Pipokusumo	Dir. PSPP
3.	Adang Suhara	Kasubdit TPL
4.	Ade Suryadi	Kasubdit Kompu DJPBP
5.	Ariastuti	Kasie Taperum
6.	Hendi Hendarmin	Kasie PL
<b>YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN (YKPP)</b>		
1.	Hary Juwono	Ketua YKPP
2.	Mulhim Asyrof	Sekretaris YKPP
3.	Joeliarso	Bendahara YKPP
4.	Moh. Amien Sy.	PLT. Kabid Perum
<b>BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (BAPETARUM PNS)</b>		
1.	Heroe Soelistiawan	Dirut Bapertarum
2.	Edy Dharmawan	Dir. Renstra
3.	Ferry Setiawan	Pjs. Kadiv Hk.

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris,

  
**Dra. Nurani Bodroini**  
NIP. 196007031988032001